

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, cet.1, Yayasan Perludem, Jakarta,
- Didik Supriyanto, *Et. Al.*, 2013, *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, cet.1, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- ., 2021, *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Djayadi Hanan, 2014, *Menakar Sistem Presidensialisme Multipartai di Indonesia*, cet. 1, Al-Mizan, Bandung.
- Dri Utari Christina Rachmawati, 2014, “*Legitimasi Calon Presiden Purnawirawan Tahun 2014 dalam Mekanisme Presidential Threshold*” dalam *Pemilihan Umum Serentak*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fadli Ramadhanil, 2024, “*Kontroversi Ambang Batas Pencalonan Presiden: Masalah Sejak Pikiran*” dalam *Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Ferry Daud M. Liando dan Kris Nugroho, 2019, “*Nilai dan Asas Pemilu*” dalam *Tata Kelola Pemilu*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, cet.1, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Heroik M Pratama, 2024, “*Rasionalitas Besaran Parliamentary Threshold Di Mahkamah Konstitusi*” dalam *Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 6, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum di Indonesia*, cet. 1, Setara Press, Malang.

Jimly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. 11, Rajawali Pers, Jakarta

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Masduri, 2014, "Mengakhiri Polemik Presidensial," dalam *Pemilihan Umum Serentak*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mazdan Maftukha Assyayuti, Et. Al., 2022, "Pengaturan Koalisi Permanen Partai Politik pada Pemilu Serentak 2024" dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara: Menyongsong Pemilu Serentak 2024*, FH UII Press, Yogyakarta.

Miriam Budiarjo, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram University Press, Mataram.

Ni'matul Huda, 2019, *Ilmu Negara*, cet. 11, Rajawali Pers, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, cet. 13, Prenada Media Grup, Jakarta.

Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, cet. 6, Grasindo, Jakarta.

———, Et. Al., 2015, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu:Usulan Masyarakat Sipil, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta.

———., 2024, *Tata Kelola Pemilu*, cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Saldi Isra, 2017, *PEMILU Dan Pemulihan Daulat Rakyat*, cet. 1, Themis Publishing, Jakarta.

———., 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

———, 2021, *Pergeseran Fungsi Legislatif*, cet. 5, Rajawali Pres, Jakarta

Saldi Isra dan Khairul Fahmi Isra, 2021, *Pemilihan Umum Demokratis :Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, cet.1, Publika Global Media, Yogyakarta.

Zainal Arifin dan Muhidin M. Dahlan Mochtar, 2025, *Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia*, cet. 1, Buku Mojok, Yogyakarta. Djayadi Hanan, 2014, *Menakar Sistem Presidensialisme Multipartai di Indonesia*, cet. 1, Al-Mizan, Bandung.

Koalisi Masyarakat Sipil, *Rancangan Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil: Buku 1 Desain Sistem Pemilu*.

Komisi Pemilihan Umum, 2017, *Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

B. JURNAL

Abdul Ghoffar, 2018, “Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, November 2018.

Arsul Sani, *Et. Al.*, 2025, *Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna, Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 4, Desember 2025.

Asrinaldi, 2013, "Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.

Beverly Evangelista, 2014, Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut UUD 1945, Jurnal IUS, Vol. 2, No. 5, Agustus 2014.

Bunga Asoka Iswandari dan Isharyanto, 2019, "Penerapan *Parliamentary Threshold* Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Res Publica, Vol. 3, No. 1, April 2019.

Dan Slater, 2018, Party Cartelization Indonesia Style: Presidential Power Sharing and The Contingency of Democratic Opposition, Journal of East Asian Studies, Vol. 18, No. 1, Maret 2018

Deni Angela dan Mohammad Novrizal, 2025, "*Comparative Approaches to Parliamentary Thresholds in Selected Countries : Lesson Learn for Indonesia*," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, Juli 2025.

Djayadi Hanan, 2016, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 13, No. 1, 2016.

Efriza, 2019, Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16, No. 1, Juni 2019.

Fitra Arsil, 2018, "Karakter Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Jurnal Ketatanegaraan," Vol. 10, No. 6, Agustus 2018.

Eugen Mohammad, 2025, "Penerapan Sistem Campuran Sebagai Upaya

Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 3, September 2025.

Firman Noor, 2016, “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia,” Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42, No. 1, April 2016.

Fitra Arsil, 2018, “Karakter Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 10, No. 6, Agustus 2018.

Harimurti Adi Nugroho, O Djunaedi, dan, Ismail, 2025, “*Formulation of Coalition Threshold For Political Parties Based on Proportionality Principles In The Presidential Election Post Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024*,” Asian Journal of Social and Humanities, Vol. 3, No. 5, Februari 2025.

Heroik M. Pratama, 2016, “Menyederhanakan Sistem Kepartaian,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 9, No. 9, Agustus 2016.

Idul Rishan, 2020, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 2, Mei 2020.

Jamaludin Ghafur, 2023, “Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pembentukan Kabinet Profesional (Zaken Kabinet) Di Indonesia,” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2023.

Mei Susanto, *Et. Al.*, 2025, “*Fat Coalition and Crown-Presidentialism: A Critical Review of Indonesia’s Concurrent Elections*,” Jurnal Petita, Vol. 10, No. 1, April 2025, hlm. 40.

Mei Susanto, *Et. Al.*, 2025, “*Constitutional Repair through Opposition Reform : Designing the Right of the Opposition and Incentive Systems to Counter Democratic Deterioration in Indonesia*,” Jambura Law Review, Vol. 7, No. 2, Juli 2025.

Mudiyati Rahmatunnisa, 2017, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?,” Jurnal

Bawaslu, Vol. 3, No. 1, November 2017.

Okky Singgih Laksono Waskita Aji, Hasyim Asy'ari dan Lita Tyesta A. L. W, 2016, "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

Pippa Norris, 2013, "*The New Research Agenda Studying Electoral Integrity*," *Electoral Studies*, Vol. 32, No. 4, Juli 2013.

Ratnia Solihah, Dede Sri Kartini dan Ari Ganjar Herdiansyah, 2022, "Sosialisasi Model Rekrutmen dan Model Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi," *Jurnal Kamawula*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022.

Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz, 2022, "Calon Tunggal Pilkada: Krisi Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, Maret 2022.

Rustam HS Akili dan Willya Achmad, 2023, "*The Role of Political Parties in The Implementation of Democratic General Elections in The Indonesian State Administration System*," *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 4, Agustus 2023.

Saldi Isra, 2014, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No. 3, September 2014.

Scott Mainwaring, 1993, "*Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination*," *Comparative Politic Studies*, Vol. 26, No. 2, Juli 1993.

Sri Yanuarti dan Moch Nurhasim, 2013, "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.

Songga Aurora Abadi dan Fitra Arsil, 2022, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (*Threshold*) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem

Multipartai Sederhana Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol. 2, No. 1, Mei 2022.

Umbu Rauta, 2014, “Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif,” Jurnal Konstitusi, Vol.11, No. 3, September 2014.

Yunuar Riza Hakiki, 2020, “Relevansi Gagasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jalur Perseorangan Terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi,” Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020

C. MAKALAH/ARTIKEL

Democracy and Security The Global Commission on Election, 2012, "Deeping Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Election Worldwide," International IDEA, Stockholm, September 2012.

Jack Bailey, 2025, “*Where’s the Post in First-Past-the-Post (and Beyond)? A Logical Model of the Effective District-Wide Threshold*,” American Political Science Association (APSA), Agustus 2025.

Micaela Del Monte, *Et. Al.*, 2024, “*European Elections 2024 Electoral Thresholds in European Parliament Elections*,” European Parliamentary Research Service (EPRS), April 2024.

Pippa Norris, Richard W. Frank, dan Ferran Martínez, 2014, “*Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*,” Cambridge University Press, Oktober 2014.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Amending the Act Concerning The Election Of The Representatives of the European Parliament by Direct Universal Suffrage, Annexed to Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Universal Declaration of Human Right.

Constitución Política de Colombia de 1991

Constitución Política de la República de Costa Rica



E. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

F. NASKAH AKADEMIK

Kementerian Dalam Negeri, 2016, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jakarta, Setjen dan BK DPR RI.

G. RISALAH SIDANG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-3 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-6 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-8 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-19 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pemilihan Umum, Jakarta, DPR RI

H. BERITA ACARA

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Berita Acara NOMOR 175/PL.02.2- BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Berita Acara NOMOR 176/PL.02.2- BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

I. WAWANCARA

Wawancara dengan Heroik Mutaqin Pratama, Peneliti Perludem, 12 Mei 2026.

Wawancara dengan Devi Darmawan, Peneliti BRIN, 15 Mei 2026.

J. OPINI

Fadli Ramadhanil, Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Pemilu 2019, Opini Kompas.

Moch Nurhasim, Menjadi Oposisi Politik, Opini Kompas.

Ramlan Subakti, Efek “Ekor Jas” yang Tak Berpengaruh, Opini Kompas

Titi Anggraini, Jalan Tengah Pemilu Campuran, Opini Kompas.

Zainal Arifin Mochtar, Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial, Opini Kompas.

K. INTERNET

ACE Project, 2013, *The Encyclopaedia: The Threshold*.
<https://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/esd02/esd02e/esd02e02>, Diakses pada 20 Desember 2025.

Aditya Pradana Putra, KPU: Hasil Pilpres 2019 dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Menang 55%, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,50%, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48329211>, diakses pada tanggal 7 April 2026.

Andry Novellno, Demokrat Tegaskan Siap Jalani Peran Oposisi Maupun Koalisi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190629140135-32-407586/demokrat-tegaskan-siap-jalani-peran-oposisi-maupun-koalisi>, diakses pada tanggal 14 Juli 2026.

Anggi Muliawati, Di DPR, Ahli Usul Ambang Batas Maksimal Koalisi pencalonan Presiden 50%, <https://news.detik.com/berita/d-7796264/di-dpr-ahli-usul-ambang-batas-maksimal-koalispencalonan-Presiden-50>, diakses pada tanggal 22 April 2025.

Charlotte Eaton, Colombia's First Leftist President? 2022 Election from a Historical Perspective. <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2022/06/23/colombias-first-leftist-President-2022-historical-perspective/>, diakses pada tanggal 27 April 2026.

Dany Garjito dan Fita Nofiana, Panda Nababan Bongkar Alasan Mahfud Gagal Jadi Wapres Jokowi, Punya Persoalan dengan Partai, Khususnya Cak Imin, <https://www.suara.com/news/2023/01/10/114221/panda-nababanbongkar-alasan-mahfud-md-gagal-jadi-wapres-jokowi-punya-persoalan-dengan-partai-khususnya-cakimin>, diakses pada tanggal 31 Mei 2026.

Dewi Nurita, Gagal Jadi Cawapres, Mahfud MD Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi, <https://www.tempo.co/politik/gagal-jadi-cawapres-mahfud-md-ditunjuk-jadi-menteri-jokowi-693759>, diakses pada tanggal 31 Mei 2026.

Egi Adyatama, "Mengapa Akhirnya Partai Demokrat Bergabung dalam Koalisi Jokowi?" <https://www.tempo.co/arsip/partai-demokrat-koalisi-jokowi-27106m>, diakses pada 1 Oktober 2015.

Elizabeth Reyes L., Colombia Lawmakers Approve a One Trim Limit For Presidents,https://english.elpais.com/elpais/2015/06/04/inenglish/1433416990_898964.html, diakses pada tanggal 27 April 2026.

Evana Trikarinaputri, Megawati Tegaskan PDI-P Bukan Oposisi dan Koalisi Pemerintah tapi Partai Penyeimbang,<https://www.tempo.co/politik/megawati-tegaskan-pdip-bukan-oposisi-dankoalisi-pemerintah-tapi-partai-penyeimbang-2054186>, diakses pada tanggal 09 april 2025.

Fajar Pebrianto, “Sederet Fakta Bergabungnya PAN ke Partai Koalisi Jokowi”<https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta-bergabungnya-pan-ke-partai-koalisi-jokowi-480285>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Haris Prabowo, Perludem: Presidential Threshold Berpontesi Hanya Milik Elit Parpol, <https://tirto.id/perludem-Presidential-threshold-berpotensi-hanya-milik-elit-parpol-cQh7>, diakses pada tanggal 17 April 2024.

Hendrik Yaputra, “Maruarar:Prabowo Yakin KIM Plus Jadi Koalisi Permanen, Kuasai 80 Kursi Parlemen,” <https://www.tempo.co/politik/maruarar-prabowo-yakin-kim-plus-jadi-koalisi-permanen-kuasai-80-kursi-parlemen-1207299>, diakses 3 Oktober 2025

Jamaludin Ghafur, “*Presidential Threshold*,”<https://law.uui.ac.id/blog/2017/01/24/Presidential-threshold/>, diakses 17 November 2025.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,<https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,<https://www.kpu.go.id/page/read/1077/spesimen-surat-suara-calon-Presiden-dan-wakil-Presiden-pemilu-2019>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Rilis KPU Tetapkan KPU Tetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, https://www.kpu.go.id/dmdocument/169993717013_KPU_Tetapkan_Pasangan_Calon_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Pemilu_2024_konpers.pdf, diakses pada tanggal 02 Juni 2026.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemilihan Umum tahun 2009, <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>, diakses pada tanggal 02 Juni 2026.

Komisi Pemilihan Umum Jakarta, <https://kpujakarta.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/pencalonanpilpres-2004.pdf>, diakses pada tanggal 01 Juni 2026.

Liputan6, Syarat Presiden Sarjana Mengundang Silang Pendapat, <https://www.liputan6.com/news/read/138847/syarat-Presiden-sarjana-mengundang-silang-pendapat>, diakses pada tanggal 01 Juni 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>, diakses pada tanggal 19 April 2026.

Tico Times, Laura Fernandez Wins Costa Rica Presidency in the First Round, <https://ticotimes.net/2026/02/01/laura-fernandez-wins-costa-rica-Presidency-in-the-first-round-vote>, diakses pada 27 April 2026.

Nicholas Ryan Aditya dan Jessi Carina, Kisah Gus Dur yang Tak Dibiarkan bertanding dalam Pilpres 2004, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/08/09590031/kisah-gus-dur-yang-takdibiarkan-bertanding-dalam-pilpres-2004?page=all>, diakses pada tanggal 01 Juni 2026